

STUDI LITERATUR MENGENAI KOMUNALISME LOKAL DENGAN IDEOLOGI NEGARA DALAM POLITIK DEMOKRASI

Pingky Monica Hasugian *¹

Universitas Negeri Medan, Indonesia

hasugianpingkymonica@gmail.com

Halimah

Universitas Negeri Medan, Indonesia

hahalimah@gmail.com

Martua Felix Jonatan Simanullang

Universitas Negeri Medan, Indonesia

felixsimanullang262@gmail.com

Mira Cahya

Universitas Negeri Medan, Indonesia

miracahya259@gmail.com

Mutiara Fadhilatul Jannah

Universitas Negeri Medan, Indonesia

mutiarafadhiatuljanah@gmail.com

Abstract

This article tries to reveal the dynamics of communism in the history of the nation in Indonesia and the political state examines it within the framework of philosophical thought. Communism is based on the ideas of kinship, regionalism, religion, tribal identity, and others as binding and motivating each individual to put society first before his own interests as an individual. Communalism is closely related to public policy because of the existence of communalism in the political system. Always acting in the name of the public interest in forming political policies and communism requires the obedience of all citizens in its implementation. General community policy in Indonesia does not represent everyone's awareness of their rights and responsibilities, but represents the identity of the community, so that who becomes the leader and figure of the community determines the general order.

Keywords: Communist, Communalism, Indonesia, Society.

Abstrak

Tulisan ini mencoba mengungkap dinamika komunisme dalam sejarah bangsa di Indonesia dan negara politik mengkajinya dalam kerangka pemikiran filosofis. Komunisme didasarkan pada gagasan kekerabatan, kedaerahan, agama, identitas suku, dan lainnya sebagai pengikat dan motivasi setiap individu untuk berbuat lebih mendahulukan masyarakat di atas kepentingannya sendiri sebagai individu. Komunalisme erat kaitannya dengan kebijakan publik karena adanya komunalisme dalam ada nya sistem politik Selalu bertindak atas nama kepentingan umum dalam pembentukan kebijakan politik dan komunisme memerlukan ketaatan seluruh warga negara dalam pelaksanaannya. kebijakan umum Komunitas di Indonesia tidak mewakili kesadaran setiap orang akan hak dan tanggung jawabnya, melainkan representasi identitas

¹ Korespondensi Penulis.

komunitas/komunitas, sehingga siapa yang menjadi pemimpin dan tokoh masyarakat, menentukan tatanan umum.

Kata Kunci : Komunis, Komunalisme, Indonesia, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Komunalisme Indonesia adalah ideologi komunal yang mengedepankan integritas dan supremasi timbal balik baik agama maupun etnis, dan komunalisme ini memiliki empat ciri utama. Pertama, keterkaitan yang sangat erat antar wilayah yang berbeda; kehidupan di satu sisi dan antara setiap warga negara, dan kelompok. Konsep manusia bukan hanya makhluk ekonomi, tetapi juga makhluk ekonomi. Namun ia juga merupakan makhluk ekonomi, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Setiap orang penting dan menemukan makna hanya ketika hidup bersama kelompoknya.

Kedua, dalam komunalisme, Kehadiran dan pengaruh dunia supranatural dapat dirasakan dan ada dimana-mana. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia; Namun hal ini juga mengungkapkan keberadaan-Nya dalam diri manusia. Tuhan hadir di setiap sudut dunia fisik, batasan fisik dan batasan sosial Segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah milik Tuhan dan berasal dari Tuhan. Termasuk kekuatan pemimpin yang diyakini berasal dari anugerah Tuhan. Manusia sebagai pemimpin diposisikan sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam konteks komunalisme seperti ini, pemuka agama dan keyakinan agama memegang peranan penting dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. dan keyakinan mereka, kepercayaan yang bertindak sebagai perwakilan institusi Tuhan.

Ketiga, komunalisme sangat kuat dan sekaligus peka terhadap batas wilayah dan identitas. Setiap komunitas suku, agama, dan kepercayaan dipersatukan oleh kepercayaan yang unik dan batas-batas yang jelas. Keempat, batas wilayah juga ditentukan oleh identitas budaya yang dapat diwujudkan melalui keunikan bahasa dan adat istiadat kelompok tersebut, dan etnis di Indonesia mempunyai ikatan yang erat dengan negara. Oleh karena itu, para pemimpin agama dan suku berperan penting sebagai aktor kunci dalam komunitas politik dan membentuk kebijakan publik.

Fenomena konsolidasi komunalisme di Indonesia tidak lagi didasari oleh budaya, namun menandakan adanya relasi kekuasaan baru bagi komunalisme di Indonesia. Artikel ini berupaya mengungkap dinamika komunalisme dalam sejarah Indonesia dan mengkajinya dalam bidang pemikiran filsafat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya yang berisi teori teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat literatur dimana peneliti mengandalkan berbagai literatur untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Digunakan untuk mengidentifikasi hasil

temuan penelitian terdahulu dari suatu fenomena terkait yang akan diteliti yang kumpulan dari fakta dan data yang berupa teori atau kajian yang digunakan sebagai landasan suatu karya ilmiah. Dalam penelitian kepustakaan, bahan yang dapat dicari dapat berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, indeks dokumen, indeks naskah dan sumber perpustakaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunalisme dapat memberikan ruang bagi ekspresi dan opini individu. Tetapi, pada akhirnya sesuatu yang diprakarsai dan diputuskan oleh negara dan para pemimpinnya. Hal ini harus tetap menjadi prioritas dalam setiap keputusan dan kebijakan publik. Komunalisme Indonesia kental dengan pemikiran orientalis yang menjadikan negara sebagai masyarakat dan pemimpinnya patut dihormati dan disegani. Gagasan ini tampaknya menolak gagasan negara demokrasi modern yang mendukung hak-hak individu dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi.

Dalam konteks negara Indonesia, Komunalisme negara tampak seperti cangkang telur yang mengandung berbagai komunalisme agama dan etnis. Banyak pasal dalam UUD 1945 dan amandemennya yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap individu. Namun sebagian besar pasal dalam UUD 1945 memuat gagasan tentang komunisme. Dalam kehidupan bernegara, yang disebut “Negara Republik Indonesia Harga Mati” adalah istilah yang digunakan untuk menciptakan rasa negara komunis. Tetapi di sisi lain, masyarakat masih hidup dengan konsep agama dan komunalisme etnis, dimana hegemoni dapat semakin melemahkan komunalisme negara.

Saat ini, komunalisme agama dan etnis di Indonesia merupakan antitesis dari komunisme negara, dan menggunakan argumen negara demokrasi modern yang mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan publik. Perjuangan antara komunisme negara dengan komunisme agama dan etnis terlihat dalam penerbitan berbagai produk hukum. Di Indonesia misalnya, peraturan daerah tentang pemerintahan daerah sendiri. Undang-undang pemilu dan lain-lain yang mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan nasional.

Produk hukum dan undang-undang yang ada saat ini tampaknya masih belum memuaskan sebagian warga. Sebab, produk hukum masih bersifat sektarian dan melayani kepentingan kelompok agama dan etnis tertentu. Komunisme agama dan etnis yang diperkenalkan ke dalam ranah politik telah menjadi cara berpolitik yang mengedepankan identitas tertentu demi meraih kekuasaan. Inilah yang disebut dengan politik identitas. Politik identitas yang menggunakan komunisme agama telah menjadi topik populer di media sosial akhir-akhir ini karena para elit politik menggunakannya secara kasar untuk mendapatkan kekuasaan. Pemahaman komunisme agama ini digunakan dalam politik praktis untuk menekan dan mengalahkan pesaing yang berbeda identitas agama.

Dalam politik demokrasi, terdapat pembahasan mengenai komunalisme lokal dan ideologi negara. Komunalisme lokal merujuk pada kecenderungan individu atau kelompok dalam memprioritaskan kepentingan lokal atau regional di atas kepentingan nasional (HiariEj, 2008). Sementara itu, ideologi negara mengacu pada pandangan atau prinsip yang menjadi dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat (Masduki, 2017). Dalam konteks ini, terdapat pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara komunalisme lokal dan ideologi negara dalam politik demokrasi (Pradipta & Soetisna Putri, 2021). Apakah

komunalisme lokal dapat mengancam kesatuan dan integritas negara? Bagaimana negara mengelola perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama? Upaya memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu merumuskan strategi politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Komunalisme lokal merujuk pada kecenderungan individu atau kelompok untuk memprioritaskan kepentingan lokal atau regional di atas kepentingan nasional (Trinarso, 2019). Hal ini dapat mengancam kesatuan dan integritas negara jika tidak dikelola dengan baik, terutama jika terjadi pemberangusannya kelompok berdasarkan suku, etnis, agama, atau politik. Negara perlu mengelola perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan bersama. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana negara dapat menangani ancaman-ancaman seperti radikalisme, komunisme, separatisme, dan korupsi. Memahami dan mengatasi tantangan ini dapat membantu merumuskan strategi politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Komunalisme Lokal:

Identitas Lokal: Komunalisme lokal mengacu pada penekanan pada identitas dan kepentingan lokal atau komunitas kecil dalam suatu negara atau wilayah. Ini dapat mencakup suku, etnis, agama, atau wilayah geografis tertentu. **Partisipasi Aktif:** Penganut komunalisme lokal cenderung aktif dalam kehidupan politik dan sosial di tingkat lokal. Mereka mungkin memiliki tradisi partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan menjaga nilai-nilai lokal mereka.

Ideologi Negara:

Kesatuan dan Integrasi: Ideologi negara umumnya mencakup konsep kesatuan dan integrasi, di mana ada upaya untuk menyatukan berbagai kelompok dan kepentingan di dalam suatu negara. Ini dapat mencakup pembentukan identitas nasional yang bersifat inklusif. **Prinsip Demokrasi:** Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat. Dalam konteks ini, ideologi negara mungkin mempromosikan nilai-nilai demokrasi, seperti hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan proses pengambilan keputusan yang adil.

Pemaduan Komunalisme Lokal dan Ideologi Negara dalam Politik Demokrasi:

Desentralisasi: Sistem politik yang mendukung komunalisme lokal dapat melibatkan desentralisasi kekuasaan, memberikan otonomi kepada tingkat lokal. Ini dapat mengakomodasi kepentingan dan nilai-nilai lokal sambil tetap terintegrasi dalam struktur negara. **Representasi Inklusif:** Dalam politik demokrasi, penting untuk menciptakan mekanisme representasi yang inklusif. Ini berarti memberikan wakil bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang mewakili komunitas lokal.

Negara sebagai Penjaga Keseimbangan: Ideologi negara dapat berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal. Negara harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil mencerminkan keadilan dan kebutuhan semua kelompok masyarakat. **Pendidikan dan Pembentukan Identitas Nasional:** Pendidikan dapat digunakan untuk membentuk identitas nasional yang inklusif, yang menghormati keberagaman budaya dan lokalitas sambil tetap membangun kesatuan nasional. **Partisipasi Politik Lokal:** Mendorong partisipasi politik dari tingkat lokal dapat memperkuat demokrasi dan meredakan ketegangan antara komunalisme lokal dan ideologi negara.

Komunalisme lokal dan ideologi negara, khususnya Pancasila, memiliki peran penting dalam politik demokrasi di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara menempatkan kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik. Konsep demokrasi Pancasila sendiri berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai paham demokrasi yang tidak membedakan masyarakat dalam struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan, serta memberikan kesempatan yang adil. Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya sekedar bentuk pemerintahan, melainkan juga suatu bentuk kehidupan bersama dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, dalam politik demokrasi, komunalisme lokal dan ideologi negara harus diintegrasikan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Komunalisme sangat berkaitan dengan kebijakan publik karena komunalisme selalu mengatasnamakan demi kepentingan umum dalam membuat kebijakan publik dan komunalisme menuntut ketaatan semua warga negara untuk melaksanakan kebijakan publik. Komunalisme di Indonesia bukanlah representasi kesadaran setiap individu atas hak dan kewajibannya, melainkan representasi identitas komunal/komunitas, sehingga siapa yang menjadi pemimpin dan tokoh komunal akan menentukan kebijakan publik. Komunalisme negara Indonesia dewasa ini dirongrong oleh menguatnya hegemoni komunalisme agama dan etnis sehingga beberapa produk kebijakan publik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi warga negaranya karena beberapa telah condong pada kepentingan kelompok tertentu.

Bentuk-bentuk komunalisme agama dan etnis dalam komunalisme negara perlu dikelola dengan baik demi tujuan kepentingan umum yang lebih luas. Komunalisme negara Indonesia perlu dikuatkan melalui penguatan konstitusi dan berbagai produk hukum turunannya serta melalui pembangunan nation building yang tepat. Dewasa ini, kebutuhan Nation Building yang perlu dibangun bukanlah pada tataran pemahaman ideologi negara tetapi terpenting adalah pada kesadaran warga negara akan eksistensi dan realitas kemajemukan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan komunal, dalam pemahaman yang mendalam akan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua.

DAFTAR PUSTAKA

- HiariEj, E. (2008). Formasi Negara Neoliberal dan Kebangkitan Komunalisme. *Journal Mandatory Edisi*.
- Lampe, M. (2013). Pengelolaan Sumber Daya Laut Kawasan Terumbu Karang Takabonerate dan Paradigma Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo Masa Lalu. *Antropologi Indonesia*, 33(3). <https://doi.org/10.7454/ai.v33i3.2465>
- Masduki, M. (2017). MENYEGARKAN KEMBALI ISU SEKTARIANISME DAN KOMUNALISME DALAM ISLAM. *TOLERANSI*, 8(1).
- MS, A. B. (2017). MEMBAHAGIAKAN SESAMA MANUSIA; Perspektif Psikologi. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9(1). <https://doi.org/10.24014/trs.v9i1.4321>
- Pradipta, D. T., & Soetisna Putri, K. R. (2021). KOMUNALISME & JEJARING: MODUS UTAMA BAGI KARIRISME PARA MUDA BANDUNG DALAM MEDAN SENI

- RUPA INDONESIA HARI INI. *Kebudayaan*, 16(1).
<https://doi.org/10.24832/jk.v16i1.387>
- Pratiwi, Y. W. (2020). Komunalisme dan Krisis di Jawa Sejak Abad ke-19 hingga awal Abad ke-20. In *Menolak Wabah: Suara-suara dari Manuskrip, Relief, Khasanah Rempah, dan Ritual Nusantara*.
- Risna Nurrohmah, P. (2021). PERANAN HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA GLOBALISASI MILENIAL. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5471>
- Siregar, M. (2023). Dunia Islam Abad ke 19, 20, 21 dan Islamisasi Nusantara. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(1).
- Syamsu, S. (2008). Memahami Perkembangan Desa di Indonesia. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Trinarso, A. P. (2019). DINAMIKA KOMUNALISME DI INDONESIA DAN KEBIJAKAN PUBLIK. *Jurnal Filsafat Arete*, 08(Nomor 02).